

## ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang merata bagi setiap warga negaranya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), adalah pedoman utama bagi orientasi dan penjabaran penyusunan perencanaan membangun perekonomian Indonesia. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. koperasi yang ilegal dan tidak jelas maka perlu adanya peran notaris dalam pembentukannya agar masyarakat khususnya kota Tegal bisa aman dan nyaman untuk bergabung menjadi anggota koperasi, peneliti tertarik untuk membuat tesis yang berjudul “PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA KOPERASI DI KOTA TEGAL”

Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut, Bagaimana Peran Notaris di dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Tegal, Apa Hambatan dan Solusi Notaris di dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Tegal.

Peranan notaris tidak hanya terkait dengan pembuatan akta pendirian koperasi saja, namun juga dalam kegiatan-kegiatan koperasi yang lainnya. Notaris dapat membuat akta-akta koperasi secara utuh, sehingga para anggota koperasi merasa terarah dalam membangun koperasi tersebut. Hambatan dalam pembuatan akta koperasi yang dilakukan oleh notaris, yaitu antara lain Masalah domisili anggota terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dapat menjadi hambatan, Pembekalan tentang perkoperasian bagi notaris calon Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dirasakan belum memadai, Banyak para pendiri koperasi yang datang kepada notaris mereka tidak memahami apa itu koperasi, sehingga notaris tidak dengan gampang bisa membuat akta pendirian koperasi.

## ABSTRACT

The State of Indonesia is an independent and sovereign nation based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945), which aims to achieve equitable welfare of life for every citizen. Article 33 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia (the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia), is the main guideline for the orientation and elaboration of the preparation of Indonesian economic development planning. Build a company that suits it is a cooperative. cooperatives are illegal and not clear then the need for a notary role in its formation so that people in particular Tegal city can be safe and comfortable to join a member of the cooperative, the researcher is interested to create a thesis entitled "ROLE OF NOTARIS IN THE DEVELOPMENT OF THE ESTABLISHING AGENCY OF COOPERATIVE BUSINESS IN TEGAL CITY"

The author formulates several issues as follows, How Notary's Role in the Establishment of Deed of Cooperative Establishment in Tegal City, What Are Barriers and Notary Solutions in the Establishment of Deed of Cooperative Establishment in Tegal City. Notary's role is not only related to the making of deed of establishment of cooperatives only, but also in other cooperative activities. Notaries can make cooperative deeds intact, so that the members of the cooperative feel focused in building the cooperative. Obstacles in making a cooperative deed by a notary, among others, the problem of domicile of members associated with the possession of Identity Card which can become obstacles, Briefing about the cooperative for notary candidates Notary Deed Co-operative perceived not enough, Many of the founders cooperatives that come to their notary do not understand what a cooperative is, so notary can not easily make the deed of establishment of cooperative